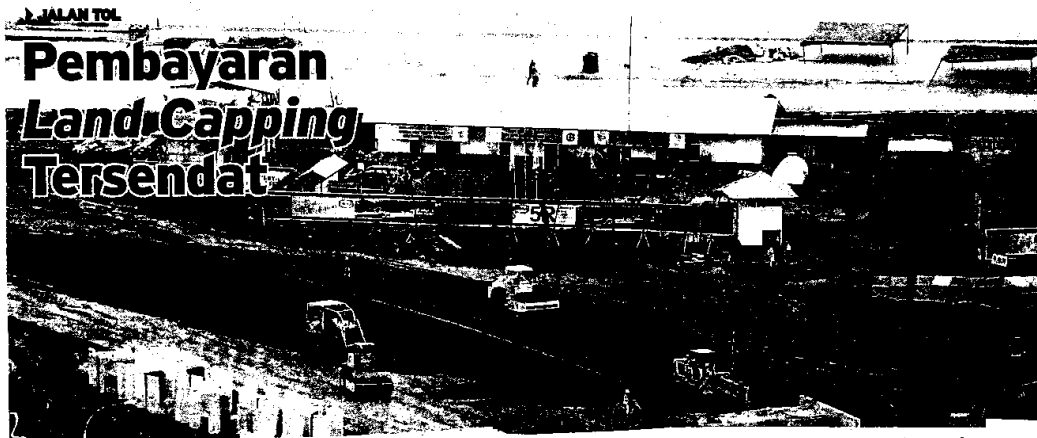




Media Title	Bisnis Indonesia		
Head Line	Pembayaran Land Capping Tersendat		
Date	16 Okt 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	30	Article Size	
Journalist	Dimas Novitasari	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	



JALAN TOL Pembayaran Land Capping Tersendat

JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum memiliki utang dana *land capping* senilai Rp265 miliar kepada lima badan usaha jalan tol (BUJT), menyusul kurangnya anggaran pada tahun ini.

Dimas Novita S.
dimas.novita@ptcitra.com

Kelima jalan bebas hambatan tersebut yakni Surabaya-Mojokerto, Semarang-Solo, Cinere-Jagorawi, Depok-Antasari, dan Pejagan-Pemalang. "Mereka itu jalan tol yang pembasannya jalan terus. Apalagi Cinere-Jagorawi karena Seksi II-nya sudah mulai," ujar Kepala Satuan Kerja (Satker) Land Capping Ditjen Bina Marga, Kementerian PU Nurdin Abdul Fatah kepada *Bisnis*, Kamis (10/10).

- Oleh karena itu, dia berharap agar
 - ▶ **Tambahan dana sudah diajukan sejak September.**
 - ▶ **Kebutuhan tahun ini meningkat tajam.**
 - ▶ **Komitmen pemerintah sangat diperlukan.**

alokasi besaran dana *land capping* dapat ditambah sesegera mungkin, sehingga bisa mendorong percepatan pembebasan tanah. Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan tambahan dana *land capping* sebesar Rp500 miliar menjadi Rp1 triliun pada tahun ini dalam APBN-P, akan tetapi usulan tersebut ditolak. Namun, sambung Nurdin, Menteri PU Djoko Kirmato juga telah mengajukan kembali surat permohonan tersebut pada pertengahan September lalu. "Semoga cepat diproses dan bisa menutupi utang *land capping* yang sudah ada," paparnya. Dana *land capping* merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah karena perubahan harga tanah. Pemerintah menanggung beban pembiayaan lahan jika harga tanah meningkat lebih dari 110% dari harga awal.

Dengan demikian kenaikan harga lahan sebesar 10% akan ditanggung oleh pemerintah dengan skema *reimbursement* yang dibiayai oleh kas BUJT terlebih dahulu. Dia menjelaskan kebutuhan dana *land capping* pada tahun ini meningkat tajam, menyusul tingginya penyerapan dana dukungan pemerintah tersebut dari masing-masing proyek jalan tol. Hingga saat ini, tutur Nurdin, dari anggaran *land capping* 2013 sebesar Rp500 miliar sudah terserap Rp489,14 miliar. "Tinggal sisa sedikit lagi, itu akan kami prioritaskan ke BUJT yang sudah meneken kontrak," katanya. Adapun, delapan ruas yang telah menyerap dana *land capping* tersebut yakni Surabaya-Mojokerto Rp124,56 miliar, Bogor Outer Ring Road (BORR) II A Rp27,07 miliar, Pejagan-Pemalang Rp14,99 miliar. Kemudian, Gempol-Pasuruan Rp9,49 miliar, Semarang-Solo Rp12,3 miliar, Cinere-Jagorawi Rp75 miliar, JORR W2 Rp26,7 miliar, dan Depok-Antasari Rp200 miliar.

PERTANYAKAN KOMITMEN

Sementara itu, Direktur Utama PT Citra Waspolutowa Tri Agus Riyanto berpendapat utang *land capping* yang

dimiliki pemerintah sangat memengaruhi proses pembebasan tanah. "Itu kan sudah kewajiban pemerintah. BUJT sudah menyelesaikan kewajibannya melalui BLU (badan layanan umum)," katanya saat dihubungi *Bisnis*, Selasa (15/10). Menurutnya, besaran dana *land capping* bukanlah masalah utama, akan tetapi bagaimana komitmen pemerintah untuk menjalankan proyek dengan skema *public private partnership* (PPP) tersebut. Harusnya, sambung Tri, pemerintah tidak menunda pembayaran dana *land capping* kepada BUJT sehingga percepatan pengadaan lahan dapat terlaksana, guna menyergerakan proses pencairan kredit dari sindikasi bank. "Kami ini kan melakukan pekerjaan fisik juga butuh dana. Kalau suh *nombokin* dana *land capping* terus juga agak sulit, apalagi capaian progres tanah masih minim, sehingga bank belum bisa *ngasih* [kredit]," paparnya. Kendati demikian, dia menyampaikan perusahaan akan berusaha mengejar konstruksi Seksi I ruas Antasari-Krukut yang merupakan bagian dari jalan tol Depok-Antasari pada tahun depan melalui pendanaan dari kas internal.

Saat ini, manajemen akan menyampaikan usulan tersebut kepada para pemegang saham, menyusul urgensi pendirian jalan tol senilai Rp4,7 triliun itu meningkat karena kemacetan Jakarta akan kian parah sejalan dengan pembangunan proyek *mass rapid transportation* (MRT). Adapun, komposisi pemegang saham dalam perusahaan tersebut yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. 62,5%, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk., dan PT Pembangunan Perumahan Tbk., masing-masing 12,5%. "Kami butuh sekitar Rp1 triliun untuk membangun Seksi IA dari Antasari ke Andara karena pembangunannya berupa struktural," jelasnya. Dia menyampaikan hingga saat ini pengadaan lahan Depok-Antasari Seksi IA dan IB yakni dari Antasari-Krukut sudah mencapai 45% dengan penggunaan dana *land capping* Rp300 miliar. Jalan tol Depok-Antasari akan dibangun sepanjang 21,5 kilometer dengan dibagi dalam dua seksi. Seksi pertama dari yakni Antasari-Sawangan 12 km dan Sawangan-Bojonggede 9,5 km. ■

Kontrak Penyaluran Dana Land Capping Anggaran 2013

Ruas	Dana Land Capping (Rp Miliar)	BUJT
Surabaya-Mojokerto	125	PT Marga Nuyasumo Agung
Bogor Ring Road (BORR) II A	30	PT Marga Sarana Jabar
Pejagan-Pemalang	35	PT Pejagan Pemalang Joli Road
Gempol-Pasuruan	25	PT Transmarga Jatim Pasuruan
Semarang-Solo	23,4	PT Trans Marga Jateng
Cinere-Jagorawi	75	PT Translingkar Kita Jaya
JORR W2	30	PT Marga Lingkar Jakarta
Depok-Antasari	100	PT Citra Waspolutowa